



DAMPAK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA ANTAR KABUPATEN JAWA BARAT

Adhitya Wardhana ¹⁾, Bayu Kharisma ²⁾ dan Mohammad Naufal Faisal Sofyan ³⁾

adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id

Departmen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Ruang lingkup penelitian yaitu seluruh Kabupaten di Jawa Barat dengan periode penelitian 2017-2020. Metode penelitian yaitu metode *fixed effect* panel data (*Generalized Least Square*) sebagai dasar perhitungan analisis variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pendapatan perkapita merupakan variabel tidak bebas dalam penelitian ini, sedangkan variabel dana desa, pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menjelaskan variabel dana desa, pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Sedangkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh negative terhadap pendapatan perkapita.

Kata Kunci: Pendapatan Perkapita; Dana Desa; *Generalized Least Square*

Abstract

This study aims to analyze impact of government spending and revenues on per capita income in West Java. The research area are all districts in West Java with period 2017-2020. The research method is the fixed effect panel data method (Generalized Least Square) as the basis for calculating the analysis of independent variables on dependent variables. Per capita income variable is the dependent variable in this study, while the variables of dana desa, local revenue, government expenditure and population are independent variables. The results of the study explain that the variables of village funds, regional original income and government expenditures have a positive and significant impact on per capita income. While the population as a control variable has a negative effect on per capita income.

Keywords: *Percapita Income; Dana Desa; Generalized Least Square*



Mengutip Ini Sebagai: Wardhana, Kharisma, Sofyan, 2021. Dampak Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita antar Kabupaten Jawa Barat. *Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 131-141. doi.org/10.35590/jeb.v8i2.3474

PENDAHULUAN

Setelah diberlakukan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang melaksanakan kegiatannya secara mandiri. Kegiatan pemerintah tersebut tidak terlepas dari pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan input penting dalam pembangunan daerah. Begitu pula dengan modal pembangunan menjadi input yang cukup penting selain sumber daya manusia. Pembangunan daerah tidak terlepas dari kinerja belanja daerah. Peningkatan belanja bergantung dari pendapatan daerah yang diterima dalam setiap tahun. Penerimaan daerah akan menentukan perencanaan anggaran belanja untuk pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah berupaya mencari sumber penerimaan daerah untuk dijadikan sebagai modal dalam membangun daerah menjadi lebih baik (Watulingas et al., 2018). Hasil pembangunan daerah pada umumnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah. Tingkat konsumsi yang meningkat akan meningkatkan volume pajak sehingga penerimaan daerah menjadi besar. Selain itu, peningkatan pajak yang diiringi dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Amri, 2020). Indikator Pendapatan Asli Daerah yang sering disebut PAD merupakan bukti penerimaan daerah dari hasil kinerja pemerintah daerah. Peran desentralisasi fiskal ditunjukkan melalui dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah. Jadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari transfer pusat yaitu dana desa dan dana perimbangan sebagai bentuk kegiatan dalam desentralisasi fiskal.

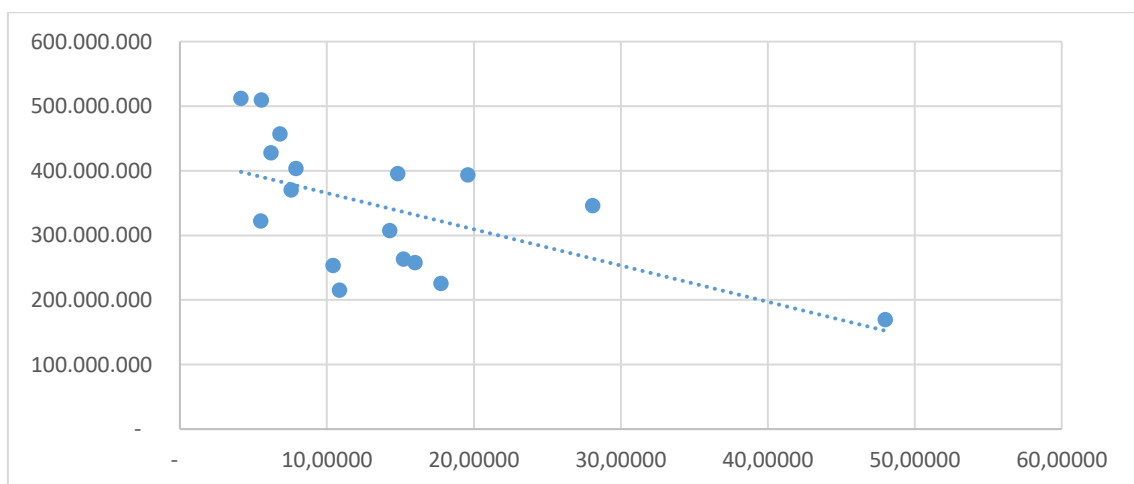
Dana perimbangan merupakan dana transfer yang terdiri dari gabungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan UU Desentralisasi No 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa dana yang bersumber dari APBN bermaksud untuk mengurangi adanya kesejangan fiskal antar pemerintah daerah. Kemudian dana desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2016 bahwa dana desa bersumber dari APBN diperuntukkan untuk desa yang ditransfer kepada APBD Kabupaten/Kota dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2015 menyebutkan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya PAD untuk memberikan wewenang pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk transfer dari pemerintah pusat juga penerimaan daerah dijadikan modal dasar pembangunan daerah. Kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui besaran proporsinya dimana semakin besar proporsi PAD terhadap total penerimaan suatu daerah, maka, semakin mandiri pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Hidayat & Nalle, 2017).

Capaian keberhasilan pembangunan dilihat dari perkembangan kesejahteraan suatu daerah. Hasil dari kesejahteraan daerah tidak terlepas dari peran mekanisme pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja yang didapat dari sumber penerimaan daerah. Peran dana desa yang sudah dijelaskan sebelumnya, digunakan untuk pembiayaan daerah yang dapat diserap oleh pemerintah daerah sebagai tambahan pembiayaan pembangunan wilayah desa. Selain pembangunan infrastruktur pedesaan, dana desa pun digunakan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat (Agustina et al., 2021). Oleh karena itu alasan dalam penelitian ini hanya Kabupaten di Jawa Barat yang akan diteliti. Disamping adanya peran dana desa, Kabupaten memiliki luas wilayah cukup besar sampai tingkat desa.

Peranan dana desa untuk mendorong peningkatan PDRB perkapita sebagai proksi kesejahteraan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Berdasarkan hasil scatter plot, dana desa belum berjalan optimal dalam meningkatkan pendapatan perkapita (welfare). Hasil scatter plot memperlihatkan hubungan negative dana desa dengan pendapatan perkapita. Perkembangan dana desa belum dapat dirasakan dampaknya terhadap kesejahteraan. Pemberian dana desa dimulai tahun 2015, hal ini pemberian dana desa belum dapat dirasakan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. *Scatter Plot* Hubungan Dana Desa dengan PDRB per Kapita Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020

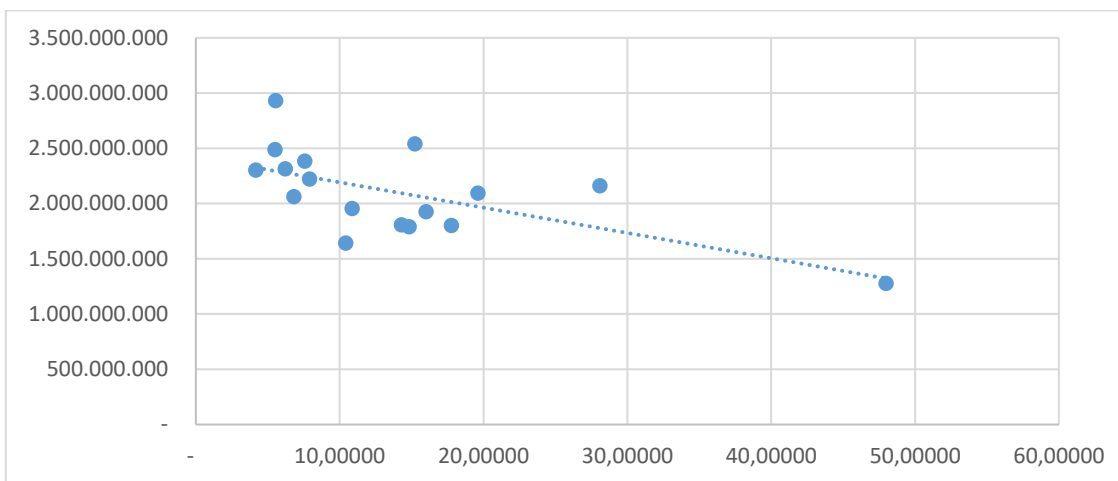


Sumber: BPS Jawa Barat (diolah)

Dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah, belum mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Pada gambar 2, terlihat hubungan negative antara dana perimbangan dengan pendapatan perkapita. Besaran dana perimbangan yang dialirkan ke pemerintah daerah untuk modal pembangunan tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Dana perimbangan yang digunakan untuk menyeimbangkan keuangan daerah dan mendorong infrastruktur daerah tidak berjalan optimal dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke

pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah, namun kondisi yang terjadi di gambar dua menunjukkan sebaliknya.

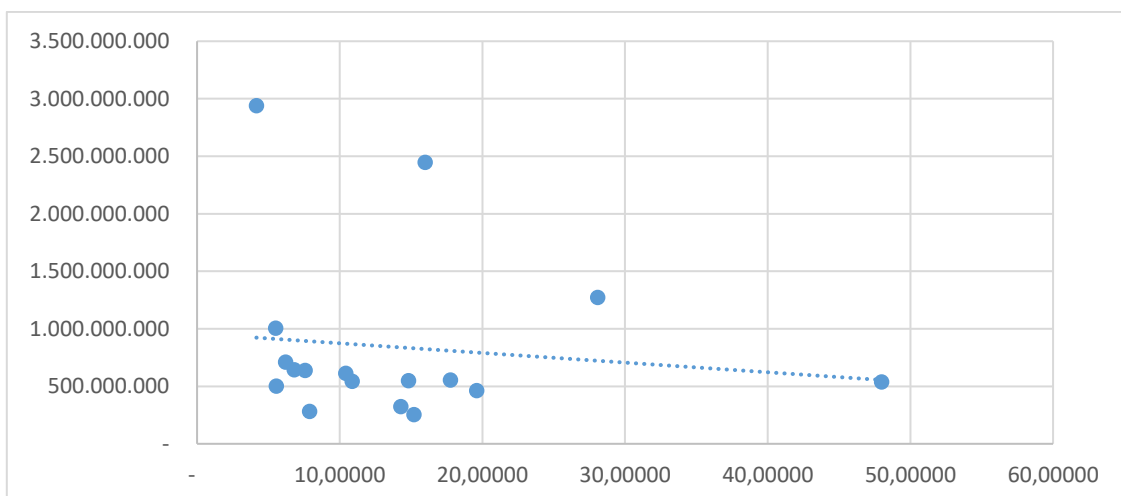
Gambar 2. *Scatter Plot* Hubungan Dana Perimbangan dengan PDRB per Kapita Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan yang diproksi dengan pendapatan perkapita. Terlihat pada gambar tiga yang menjelaskan adanya hubungan tidak searah antara pendapatan asli daerah dengan PDRB perkapita. Mekanisme pembiayaan yang sudah jelas dalam mendorong pembangunan daerah berdasarkan UU atau peraturan yang dibuat tetapi hasil yang didapat menunjukkan kurang optimalnya penerimaan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Gambar 3. *Scatter Plot* Hubungan PAD dengan PDRB per Kapita Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020

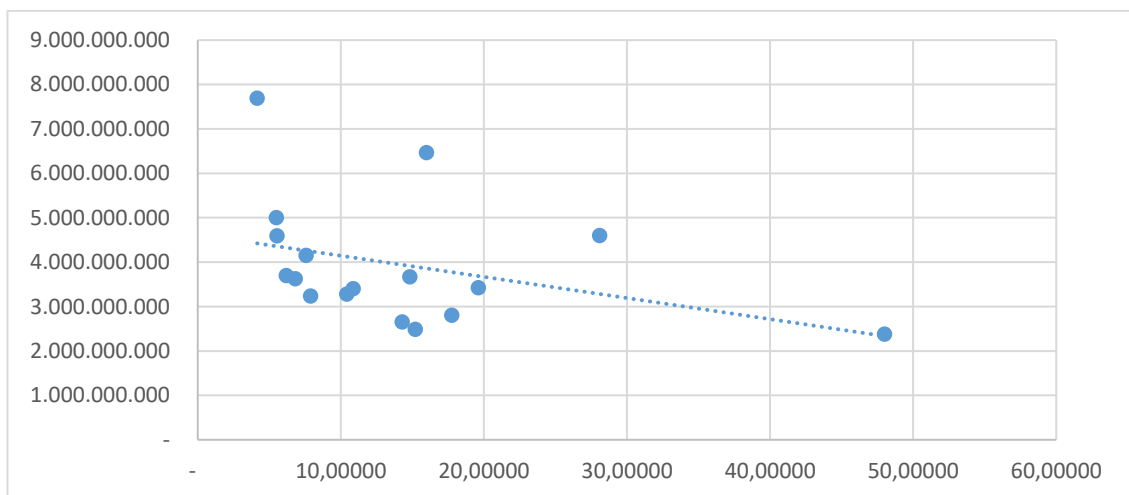


Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Penerimaan daerah yang kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah yang biasa disebut anggaran belanja pemerintah daerah. Perencanaan belanja pemerintah daerah menjadi modal yang sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan. Namun perencanaan belanja pemerintah tidak terlepas dari perkembangan penerimaan daerah.

Penerimaan daerah yang rendah akan mempengaruhi aliran yang rendah terhadap pengeluaran/belanja pemerintah daerah. Kondisi belanja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari scatter plot dibawah ini. Hasil dari scatter plot dibawah ini menunjukkan arah berlawanan antara belanja pemerintah dengan PDRB perkapita. Pengeluaran pemerintah yang disalurkan untuk kegiatan pembangunan belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Belanja pemerintah selama ini yang disalurkan tidak berjalan sesuai sasaran dalam program.

Gambar 4. *Scatter Plot* Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan PDRB per Kapita Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan kondisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah tidak berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Begitu juga dengan kondisi pengeluaran pemerintah yang tidak menunjukkan hasil yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah menjadi kunci dalam melihat kinerja belanja pemerintah yang baik. Tata Kelola pemerintah yang baik seharusnya dapat menyalurkan modal/belanja pemerintah dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam penelitian ini, akan melihat seberapa pengaruh penerimaan daerah dan belanja pemerintah mempengaruhi pendapatan perkapita. Kemudian pengaruh tata kelola pemerintah daerah dalam mempengaruhi pendapatan perkapita. Selanjutnya dalam sisi lainnya tingkat populasi akan mempengaruhi perkembangan

pendapatan perkapita. Populasi yang kurang produktif atau banyaknya usia non Angkatan kerja akan mempengaruhi perkembangan pendapatan perkapita.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif dalam menganalisis pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten Jawa Barat. Data penelitian bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Data dana desa, pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah daerah bersumber dari DJPK. Untuk indikator PDRB perkapita dan kepadatan penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan data dummy variabel akutansibilitas bersumber LAKIP. Model yang digunakan adalah model panel data merupakan gabungan *cross section* dan *time series* tahun 2017-2020 dengan ruang lingkup 17 Kabupaten di Jawa Barat. Penelitian ini mengacu pada Pasichnyi et al., (2019) dengan melihat dampak dari desentralisasi fiskal yang terbagi berdasarkan pengeluaran dan pendapatan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini hanya menggunakan wilayah Kabupaten di Jawa Barat disebabkan ingin melihat sejauhmana perkembangan indikator dana desa terhadap pendapatan perkapita, dimana dana desa cenderung diberikan di wilayah Kabupaten. Adapun persamaan model penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

$$PDRB_Cap_{it} = \alpha_0 + \beta_1 RASDES_{it} + \beta_2 LnPAD_{it} + \beta_3 LnBL_{it} + \beta_4 POP_{it} + u_{it} \quad (1)$$

dimana $PDRB_Cap$ adalah pendapatan perkapita sebagai variabel dependen, $RASDES$ merupakan rasio dana desa terhadap PDRB dan $LnPAD$ adalah pendapatan asli daerah dalam bentuk logaritma natural. Variabel bebas lainnya yaitu belanja langsung pemerintah dalam bentuk logaritma natural ($LnBL$), variabel POP adalah jumlah penduduk. i merupakan data *cross section* yang terdiri dari 17 Kabupaten di Jawa Barat, dan t merupakan data periode penelitian, yaitu tahun 2017-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terlebih dahulu dilakukan pengujian statistic dan pengujian model terbaik. Model yang terbaik dengan menggunakan uji Hausman dan uji Chow. Berdasarkan pengujian kedua tersebut menunjukkan model yang terbaik dari seluruh model penelitian menggunakan *fixed effect model*. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Generalized Least Square (GLS)*. Model *Generalized Least Square (GLS)* untuk melakukan koreksi uji asumsi klasik seperti autokorelasi dan heterokedastisitas (Gujarati & Porter, 2009).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel bebas mempengaruhi signifikan terhadap pendapatan perkapita sebagai proksi dari kesejahteraan. Nilai koefisien dari rasio dana desa terhadap PDRB ($RASDES$) sebesar 0.01043. Setiap kenaikan satu persen dari $RASDES$ akan meningkatkan pendapatan perkapita

sebesar 0.01043%. Pemberian dana desa dilihat dari nilai koefisien tidak begitu besar sehingga untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat menjadi rendah. Pendapatan desa yang dialirkan untuk kebutuhan infrastruktur desa relatif rendah sehingga terjadi kelambatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Sunu & Utama, (2019), dana mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap kesejahteraan dan mempengaruhi negative terhadap kemiskinan. Besaran dana desa semakin tinggi akan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Studi Prasetyanto PP et al., (2012), alokasi dana akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam sisi fiscal dan kegiatan ekonomi daerah serta penurunan penduduk miskin. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Rusydi, (2012) dimana alokasi dana desa memberikan efek positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan pendapatan perkapita.

Tabel 1. Hasil Regresi Persamaan Model Penelitian

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-5.70340	-13.8664	0.0000
RASDES	0.01043	6.1743	0.0000
LNPAD(-1)	0.03438	2.7052	0.0093
LNBL	0.05601	3.4398	0.0012
POP	-3.44E-07	-4.3868	0.0001
R-squared	0.99913		
Adjusted R-squared	0.99877		
F-statistic	2734.88		
Prob(F-statistic)	0.00000		

Sumber : Pengolahan Data

Nilai variabel dari PAD tahun sebelumnya sebesar 0.03438, jadi kenaikan satu persen dari PAD tahun sebelumnya akan mempengaruhi positif terhadap pendapatan perkapita sebesar 0.03438%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah non transfer pusat yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dalam aspek belanja pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur bergantung dengan penerimaan PAD selain dana perimbangan. Setiap pemerintah daerah akan mengembangkan nilai PAD berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD akan berdampak pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah akan menciptakan kesejahteraan. Perkembangan positif dari PAD akan mempengaruhi rendahnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat sehingga bantuan pusat yang lebih rendah dibandingkan PAD masih memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian daerah dan kesejahteraan. Beberapa studi menjelaskan dampak positif PAD terhadap perekonomian seperti yang dilakukan oleh Fatimah & Priyono, (2020) dalam studinya menjelaskan PAD mempengaruhi signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat di Jawa Tengah. Pendapatan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Sitompul & Lubis, (2013), menjelaskan pendapatan asli daerah sebagai modal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan kontribusi PAD semakin besar maka kegiatan pembangunan daerah akan terlaksana sesuai dengan target dan program pembangunan. Hasil serupa pun ditemukan pada penelitian Sabilla & Jaya, (2014) dimana PAD sebagai indikator desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 0.05601, setiap kenaikan 1% dari pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan perkapita sebesar 0.05601%. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari GDP pengeluaran dalam melihat arus barang dan jasa. Perkembangan pengeluaran pemerintah tergantung dari penerimaan baik penerimaan daerah sendiri maupun transfer pusat. Pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan perkapita merupakan kontribusi dari penerimaan daerah yang sudah dijelaskan pengaruh dari nilai PAD terhadap pendapatan perkapita. Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Semakin besar pengeluaran dan penerimaan maka akan semakin besar derajat desentralisasi. Menurut Lincoln, (1992) ciri pertumbuhan ekonomi yang modern yaitu meningkatnya pendapatan perkapita. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan ciri peningkatan pendapatan perkapita.

Beberapa penelitian yang menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah sebagai bentuk desentralisasi Studi Purba & Silalahi, (2019), pendapatan perkapita dalam mengukur pertumbuhan lebih komprehensif dalam melihat kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitiannya terdapat belanja pemerintah mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Perencanaan belanja pemerintah yang sesuai dengan target dan sasaran maka pendapatan perkapita (*welfare*) akan terealisasi. Menurut Krismajaya & Dewi, (2019) menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan penduduk bali. Belanja daerah menjadi sumber pengeluaran yang produktif bagi peningkatan kesejahteraan. Penelitian Zulfina & Gunawan, (2018) memberikan hasil serupa dimana belanja daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Kemudian variabel jumlah penduduk (POP) dengan nilai koefisien sebesar $-3.44E-07$. Setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 juta akan menurunkan pendapatan perkapita sebesar $-3.44E-07\%$. Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan beban ketergantungan pada penduduk usia produktif. Tingginya pertumbuhan penduduk tanpa dibarengi dengan kapasitas kegiatan ekonomi menjadikan kesejahteraan penduduk akan terhambat. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dapat mempengaruhi besaran dari kriminalitas dan pengangguran. Peningkatan penduduk dapat menghambat kegiatan perekonomian serta menurunnya angka kesejahteraan. Ledakan penduduk dengan mayoritas usia penduduk non produktif akan semakin besar beban ketergantungan individu usia kerja yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. Jumlah penduduk yang meningkat akan mendorong peningkatan jumlah barang dan jasa. Peningkatan barang dan jasa membuat produsen secara umum akan meningkatkan biaya

produksi sehingga dimungkinkan akan meningkatkan harga secara umum (inflasi). Adanya inflasi dapat berdampak terhadap penurunan kesejahteraan. Penelitian Cahyono & Kumalasari, (2021); Sudarlan, (2019) dan Masniadi, (2012) menemukan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita dimana tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan terbaginya pendapatan perkapita pada masyarakat sehingga pendapatan perkapita pun akan rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah dibahas, dalam penelitian ini variabel dana desa mempengaruhi positif dan signifikan terhadap output perkapita. Adanya dana desa dapat berjalan efektif untuk Kabupaten di Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan. Alokasi dana desa yang disalurkan ke Kabupaten Jawa Barat perlu pengawasan yang cukup baik untuk memastikan dana desa yang dikucurkan sesuai dengan program pemerintah desa. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya mempengaruhi peningkatan output perkapita. Besaran potensi daerah menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah. Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya yang cukup akan mendorong besaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lain sah.

Penerimaan daerah pada sisi PAD akan mendorong pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Jawa Barat. Peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Jawa Barat merupakan hasil kontribusi dan dampak tidak langsung dari penerimaan daerah (PAD). Kemudian pengeluaran pemerintah yang diprosikan dengan belanja langsung mempengaruhi signifikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Belanja langsung merupakan salah satu bentuk belanja produktif untuk pembangunan daerah yang dapat mendorong terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten di Jawa Barat merupakan hasil kinerja belanja langsung pemerintah daerah. Variabel jumlah penduduk berhubungan negative terhadap pendapatan perkapita. Jumlah penduduk besar akan menekan standar hidup yang dapat menurunkan pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang belum termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja menjadi beban ketergantungan penduduk usia kerja. Selain itu jumlah penduduk yang besar akan berdampak besar terhadap angka pengangguran dikarenakan lapangan kerja yang sempit sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Valeriani, D., & Kesuma, A. (2021). The Relationship of Village Funds to Poverty and Economic Growth in Bangka Belitung Islands. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–16. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/1164>
- Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 1–18. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/2585>
- Cahyono, Y. T., & Kumalasari, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli

- Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2019). In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021*. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5225>
- Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(2), 75–92. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (fifth ed.). Douglas Reiner.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71–86. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4647>
- Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), 1390–1422. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/46323>
- Lincoln, A. (1992). *Ekonomi Pembangunan* (Second Ed.). STIE YKPN.
- Masniadi, R. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 68–80. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3718>
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytyaliuk, A. (2019). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Development. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 29–39. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)
- Prasetyanto PP, E., Hutagaol, M. P., Sinaga, B. M., & Firdaus, M. (2012). *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia* [Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61121>
- Purba, S., & Silalahi, M. (2019). Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau 1Sahala. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/61>
- Rusydi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152–176.
- Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.18196/jesp.15.1.1233>
- Sitompul, M., & Lubis, A. A. (2013). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 1(1), 1–10. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547/876>
- Sudarlan. (2019). Dampak Pertambahan Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap

- Pertumbuhan Pendapatan Perkapita di Indonesia: Studi Kasus 34 Provinsi. *Jurnal Eksis*, 15(1), 42–52. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/266>
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843–872. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02>
- Watulingas, C. A. S., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 104–117. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32745>
- Zulfina, & Gunawan, E. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Perkapita di Lima Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 3(4), 606–614. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/10610>